

Judul : DPR Minta 7 Persen
Tanggal : Selasa, 27 Februari 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DPR Minta 7 Persen

Orang-orang yang berkantor di "Senayan" disebut meminta imbalan sebesar 7 persen dari total nilai proyek pengadaan KTP elektronik Rp 5,8 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi, yang juga keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, pernah menyebutkan adanya permintaan *fee* proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai orang dari "Senayan".

Hal permintaan imbalan itu diungkapkan Jimmy Iskandar, salah satu mantan staf Direktur PT Java Trade Utama Johannes Richard Tanjaya alias Johannes Tan, saat bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/2).

Menurut Jimmy, perkataan Irvanto itu disampaikan pada suatu sore tahun 2011. Jimmy alias Bobby mengaku disuruh oleh pengusaha Johannes Tan untuk menyiapkan dokumen teknis pendaftaran PT Murakabi Sejahtera sebagai peserta lelang dalam pengadaan proyek KTP-el.

Jimmy mengaku pernah mendengarkan celetukan Irvanto mengenai permintaan orang-orang dari Senayan terkait proyek itu.

"*Abot, kono njaluk pitu* (berat, orang-orang di sana meminta tujuh)," ungkap Jimmy menirukan perkataan Irvanto.

Jimmy berusaha memastikan maksud perkataan Irvanto itu dengan menanyakan lebih jauh, "*Kono sing endi* (orang sana yang mana)." Atas pertanyaan itu, Irvanto menjawab, "Senayan."

Jimmy tidak lagi bertanya lebih lanjut tentang sebutan "Senayan" itu. Ketika ditanyai oleh Hakim Anwar mengenai apakah Irvanto pernah menyebut nama Novanto, Jimmy mengatakan tidak pernah. Ia juga tidak berani memastikan bahwa yang dimaksud *pitu* oleh Irvanto ialah nominal tujuh persen dari nilai total proyek KTP-el Rp 5,8 triliun.

Merasa ditekan

Keterangan Jimmy itu didalami hakim dan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Elza Syarif, saksi lainnya.



KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/2). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan para saksi yang di hadirkan oleh jaksa, antara lain advokat Elza Syarif (kedua dari kanan), mantan Kepala Bagian Umum Kementerian Dalam Negeri Rudy Endarto, Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kemendagri Yudi Pramadi, Ketua Tim Teknis Proyek KTP-el Husni Fahmi, anggota Tim Fatmawati Jimmy Iskandar alias Bobby, Direktur Utama PT LEN Industri Wahyudin Bagenda, serta mantan Direktur Utama PNRI Isnu Edhy Wijaya.

Selain diduga menerima dari kelompok pengusaha terkait proyek KTP-el, anggota DPR juga diduga menerima dari Kementerian Dalam Negeri.

Elza menerangkan, rekannya di Partai Hanura, Miryam S Haryani, pernah mendatangnya setelah diperiksa penyidik KPK. Miryam membawa berita acara pemeriksaan (BAP) serta dalam kondisi gelisah karena tertekan dan merasa disudutkan oleh sejumlah anggota DPR yang seolah menghakiminya lantaran nama-nama mereka disebut di depan penyidik. Miryam antara lain menyebut nama Novanto, Faisal Akbar, Markus Nari, Chaeruman Harahap, dan Djamal Aziz.

Miryam mempertanyakan

untuk mencabut BAP dan berkonsultasi dengan Elza. "Saya katakan kepadanya untuk tidak mencabut BAP," ujarnya.

Miryam juga pernah menunjukkan amplop berisi kotak yang diterimanya dari Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, kepada Elza. Amplop itu bertuliskan "Komisi II DPR."

"Miryam awalnya mengaku tidak tahu isi amplop itu adalah uang. Lalu, bungkusannya itu dibawa ke Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap dan dia (Miryam) disuruh membagi-bagikan uang itu ke semua anggota Komisi II DPR. Kalau dijumlahkan

memang kecil. Dari dua kali pemberian, setiap orang mendapatkan Rp 30 juta," katanya.

Uang dari Sugiharto itu disebutkan sebagai uang reses anggota Komisi II DPR.

Terkait dengan dugaan aliran uang ke anggota DPR dan keterlibatan Novanto dalam kasus ini, Isnu Edhy Wijaya, pemimpin Konsorsium Percetakan Negara RI yang memenangkan tender proyek KTP-el, mengelak mengetahui soal itu. Jaksa dan hakim meragukan keterangannya karena beberapa kali ditanyai mengenai hal-hal teknis pengambilan kebijakan, termasuk peran Andi Agustinus alias Andi Narogong, Isnu mengaku lupa atau tidak tahu. (REK)